



# RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2023

TAHUN 2023

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1. Visi

2.2. Misi

2.3. Tujuan

2.4. Sasaran

BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan

3.2. Strategi

3.3. Program dan Kegiatan

FORMULIR RENCANA KINERJA KECAMATAN GUMELAR TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mencurahkan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gumelar Tahun 2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gumelar Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2018-2023.

Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Gumelar Tahun 2023.

Gumelar, 16 Januari 2023

  
**CAMAT GUMELAR**  
**DIAH RAPITASARI, S.STP.M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840606 2002122004

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 tahun 2015 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Gumelar Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan tahun lanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2018-2023.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **2.1.1 VISI ORGANISASI**

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, yang pada muaranya mewujudkan Visi Kabupaten Banyumas yaitu:

**“ TERWUJUDNYA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
YANG BERSIH DAN ADIL MENUJU MASYARAKAT YANG  
SEJAHTERA, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA  
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”**

Visi Kabupaten Banyumas merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada periode tahun 2018–2023.

Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan pada periode perencanaan, maka visi tersebut merupakan visi Kabupaten Banyumas yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat Kabupaten Banyumas pada umumnya.

Pemerintahan yang bersih, mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai pemerintahan yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, mengedepankan pelayanan publik secara optimal, adanya jaminan kebebasan berpendapat.

Pemerintahan yang adil berarti pemerintahan yang mampu bertindak adil, dalam arti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di Daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mendapatkan perlindungan sehingga memiliki rasa aman.

Masyarakat yang sejahtera menurut Joseph Murphy pada bukunya *"Think Yourself Rich"* dikatakan bahwa makna hidup sejahtera yang sebenarnya adalah manusia mulai mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Uang dan kekayaan hanyalah sebagian dari kesejahteraan itu. Dan tidaklah lengkap kesejahteraan manusia bila mental, spiritual, sosial, dan intelektual manusia tidak tumbuh dan berkembang

bersamaan dengan pertumbuhan kekayaan manusia karena hidup manusia akan menjadi tidak seimbang. Masyarakat yang sejahtera merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, antara lain: menurunnya jumlah penduduk miskin, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat.

Diharapkan dalam lima tahun ke depan indikator-indikator tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut dapat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Masyarakat yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai kemampuan para anggota masyarakat dari suatu daerah untuk melakukan tindakan dalam memastikan bahwa bisnis yang berbasis di daerah tersebut menghasilkan produk yang bernilai tambah lebih tinggi dalam persaingan global, karenanya menyumbang pada peningkatan PDRB dan distribusi kesejahteraan lebih luas dalam masyarakat, menghasilkan standar hidup yang tinggi, serta *virtuous cycle* dampak pembelajaran.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah-lakunya. Kebudayaan dapat berupa serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia, dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Dengan demikian, masyarakat yang berbudaya

merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi seluruh individu dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan.

Belandaskan iman dan taqwa mempunyai arti bahwa disamping terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Banyumas, juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas selalu mengedepankan norma-norma agama. Sebagai penjabaran dari Visi Kabupaten Banyumas, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan Misi karena Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam merumuskan upaya-upaya untuk mewujudkan Visi tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

## **2.2 MISI**

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sesuai visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa,

terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Dalam era reformasi dan otonomi daerah, terjadi reposisi peran pemerintah menjadi fasilitator, sedangkan masyarakat dan dunia usaha ditempatkan pada posisi pemeran utama pembangunan. Namun demikian, dalam masa transisi ini pemerintah masih tetap berperan besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong keberhasilan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau *Good and Clean Governance*, maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih, dan berwibawa bagi terwujudnya kemandirian daerah, antara lain dengan cara meningkatkan kualitas SDM aparatur sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan terarah, meningkatkan kualitas kinerja pengawasan.

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

Pembangunan kependudukan dan masyarakat berkualitas merupakan bagian yang penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik untuk mengendalikan kuantitas penduduk maupun untuk meningkatkan kualitas insani dan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diupayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pendidikan penting peranannya dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, serta keserasian antara kependudukan dan lingkungan hidup, dapat dipercepat peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan itu maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pelayanan pendidikan dimaksudkan guna memberikan pelayanan pendidikan yang

bermutu untuk seluruh masyarakat yang meliputi meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan kualitas anak didik, dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Sehat dalam arti sempit diartikan sebagai seseorang yang terbebas dari segala macam penyakit, namun dalam arti luas dapat diartikan sebagai kondisi normal, aman, nyaman, terjamin baik fisik maupun mental, dan lingkungan alam serta lingkungan sosial sehingga manusia mampu menjalankan kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Dengan demikian, masyarakat yang sehat dapat dilihat dari berbagai syarat berupa sehat badan, mental, lingkungan alam dan sosial, dan pelayanan yang dapat membantu masyarakat dalam hal tidak terpenuhinya syarat sehat tersebut dengan memberikan pelayanan peningkatan kesehatan masyarakat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya ini ditempuh dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan, dan peningkatan pelayanan bidang kesejahteraan sosial, serta peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk.

3. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

Sektor pertanian sebagai basis perekonomian harus menyatu dan memiliki peran penting dalam pembangunan yang didukung dengan sektor lain sehingga mampu mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial dan religius.

Pemerintah Kabupaten Banyumas akan memfokuskan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang didorong menjadi penggerak utama kegiatan pembangunan. Hal ini tidak berarti sektor selain pertanian akan diabaikan namun tetap diperhatikan agar bergerak secara dinamis. Pembangunan sektor pertanian

yang akan dilaksanakan adalah pembangunan agribisnis yang akan mengintegrasikan pembangunan pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan) dengan pembangunan industri hulu dan hilir pertanian serta sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Sasaran utama yang hendak dicapai dari pembangunan sektor pertanian adalah meningkatnya produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan; meningkatnya ketahanan pangan; dan meningkatnya kinerja kelembagaan, permodalan, SDM, akses pasar dan perlindungan pemerintah pada sektor pertanian.

Selain sektor pertanian, pembangunan daerah juga diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang memiliki keunggulan komparatif agar menjadi komoditas yang mempunyai keunggulan kompetitif. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak (sektor padat karya) seperti pariwisata, industri, perdagangan, dan sektor jasa lainnya seperti perbankan, yang memiliki *multiplier* efek terhadap sektor lainnya. Untuk mendukung baik sektor pertanian maupun sektor lain, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan investasi dalam rangka perluasan tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

4. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat dilakukan dengan strategi pengembangan agribisnis dalam konsep industrialisasi pertanian diarahkan pada pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem keseluruhan yang dilandasi prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan di mana konsolidasi usaha tani diwujudkan melalui koordinasi vertikal. Selain peningkatan daya saing produk pertanian, upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dalam rangka menguatkan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pelaku ekonomi dengan modal besar saja yang jumlahnya hanya segelintir orang dan menguasai perekonomian daerah.

Peningkatan peran serta sektor agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan inovasi terhadap produk-produk pertanian melalui upaya kreatif menciptakan produk-produk pertanian yang mempunyai nilai tambah yaitu produk berkualitas tinggi dan beragam sehingga mampu bersaing dengan produk negara lain serta mampu membendung membanjirnya produk-produk serupa

dari negara lain. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan perluasan jaringan pemasaran melalui kegiatan pengenalan produk dengan melakukan promosi dan pameran sehingga mampu menembus bukan hanya pasar domestik, tetapi pasar internasional. Dengan demikian kemampuan ekonomi rakyat dan devisa negara makin meningkat.

Salah satu kelemahan yang ada dalam masyarakat kita adalah lemahnya kelembagaan ekonomi yang belum mampu untuk menghimpun dan menyatukan pelaku ekonomi dalam satu wadah. Koperasi dan UKM diharapkan mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dalam bentuk pemberian bantuan modal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan upaya perluasan jaringan pemasaran.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dipilih sebagai salah satu fokus. Titik tolaknya adalah fakta rendahnya kualitas infrastruktur yang masih terus menjadi kendala utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana pemerintah tersebut didukung dengan peningkatan belanja pemerintah pada sektor infrastruktur. Pelaksanaan program ini perlu mendapat perhatian dari berbagai kalangan agar berhasil dan tidak terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan khususnya penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemerintah salah satunya diukur dengan ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk 5 tahun ke depan akan memprioritaskan penyediaan infrastruktur dengan kualitas memadai dan berwawasan lingkungan.

Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang memadai adalah modal bagi peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dalam penyediaan sarana prasarana tetap memperhatikan pendayagunaan rencana tata ruang, peningkatan pelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam.

6. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan

Dalam tahapan perencanaan, pemerintah harus memahami kondisi wilayah, artinya setiap wilayah punya karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda, baik karakteristik topografi maupun potensi

alamnya. Dengan mengenali kondisi wilayah masing-masing maka perencanaan akan lebih mudah. Setiap wilayah tidak bisa diperlakukan sama, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Perlu dipahami bahwa potensi setiap wilayah adalah berbeda sehingga tidak semua wilayah harus mendapat perlakuan yang sama. Contoh, ada wilayah tertentu yang dijadikan sebagai pusat-pusat industri, pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan permukiman agar masing-masing wilayah berkembang sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Proses pengelompokan wilayah berdasarkan ciri kesamaan atas dasar fisik dan sosial dinamakan regionalisasi atau perwilayahan. Regionalisasi selalu didasarkan pada kriteria dan kepentingan tertentu.

Permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian kita antara lain masih adanya ketimpangan pembangunan antar daerah, *urban primacy* yang cukup tinggi, relasi atau keterkaitan perkotaan-perdesaan yang kurang sinergis, wilayah-wilayah yang tertinggal dan persoalan kemiskinan. Bahkan tingkat persoalan kemiskinan semakin besar setelah krisis ekonomi.

Kesenjangan pembangunan antar daerah dapat dilihat dari kesenjangan dalam pendapatan perkapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana seperti transportasi, energi dan telekomunikasi, pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya serta akses ke perbankan. Kesenjangan pembangunan antar daerah yang terjadi selama ini terutama disebabkan oleh distorsi perdagangan antar daerah, distorsi pengelolaan sumber daya alam, dan distorsi sistem perkotaan-perdesaan.

Upaya menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mencapai percepatan pertumbuhan desa, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan perdesaan, meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang, serta pengembangan kawasan strategis.

7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman taqwa

Dalam era globalisasi ini kita dihadapkan suatu masalah yang serius dimana generasi muda menganggap budaya asing lebih praktis dan unggul dibanding budaya sendiri yang kuno dan tradisional. Budaya disini diartikan sebagai nilai-nilai, norma-

norma, peraturan, pedoman, cara-cara dan menempatkan budaya sebagai sarana yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan penunjuk arah pada tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat.

Hal ini merupakan suatu ancaman dan tantangan yang berat untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya dan tradisi. Fakta terjadi di tengah masyarakat yang semakin mengglobal adalah lunturnya nilai moral, krisis jati diri dan kepribadian serta kurang menghargai budaya, adat istiadat dan tradisi. Untuk menangkal ancaman tersebut perlu menempatkan kebudayaan dalam posisi strategis dalam membangun bangsa. Untuk itu diperlukan langkah yang nyata dalam rangka pengembangan seni budaya sendiri di tengah arus globalisasi dengan mewujudkan pengembangan karakter pemuda yang mandiri, cakap, dan berjiwa kewirausahaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga serta penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan tradisi serta kearifan lokal.

Proses pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menggunakan paradigma pembangunan yang bersifat fisik dan modernisasi sarana dan prasarana saja yang berorientasi pada pembaharuan infrastruktur kehidupan manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah pembangunan mental spiritual manusia yang berorientasi humanisasi yaitu pembangunan sebagai proses pemanusiaan manusia itu sendiri. Dengan demikian tercipta pembangunan menyeluruh dan jelas arah dan makna pembangunan yang hakiki.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama masyarakat Banyumas antara lain adalah peningkatan keimanan umat beragama dengan pemenuhan sarana dan prasarana ibadah, serta pembinaan kehidupan beragama melalui masyarakat maupun terhadap lembaga keagamaan agar tercipta toleransi antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi umat beragama yang baik maka niscaya tidak akan tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas serta mempertimbangkan kondisi, permasalahan, tantangan serta peluang yang ada di Kecamatan Gumelar, maka di dalam RENSTRA Kecamatan Gumelar 2019-2023 telah ditetapkan visi sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, TERPENUHI PELAYANAN DASAR SECARA ADIL DAN TRANSPARAN YANG DIDUKUNG DENGAN**

## **PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN APARAT YANG BERSIH TETAP MEMPERTAHANKAN BUDAYA BANYUMAS”**

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk mewujudkan Visi OPD Kecamatan Gumelar maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan umum dalam bidang sosial, Kesejahteraan, Kependudukan, ketentraman dan ketertiban, yang lebih cepat, adil dengan didukung oleh Sistem Kelembagaan Managemen yang efisien dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Pemerintah Kecamatan Gumelar;
3. Mewujudkan Pemerintah yang demokratis, dengan menjunjung tinggi hukum dalam rangka mencapai pemerintahan yang baik dan transparan;
4. Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa.

### **2.2 TUJUAN**

Tujuan yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis SKPD Kecamatan Gumelar adalah meningkatkan perwujudan supermasi hukum dalam pemerintahan yang baik, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasar pada sistem ekonomi kerakyatan.

### **2.3 SASARAN**

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Strategis SKPD Kecamatan Gumelar adalah sebagai rencana awal pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah dan penggunaan anggaran daerah selaku perangkat daerah untuk mencapai Visi Kabupaten Banyumasmampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terpenuhi pelayanan dasar secara adil dan transparan yang didukung dengan pemerintahan yang baik dan aparat yang bersih dengan tetap mempertahankan Budaya Banyumas.

## **BAB III**

### **STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 STRATEGI ORGANISASI**

Dalam mewujudkan tujuan organisasi, strategi yang dilaksanakan SKPD Kecamatan Gumelar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan/ mengembangkan kualitas kemampuan aparatur kecamatan melalui pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ( DIKLAT )
2. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi yang tertib;
3. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat dengan tetap mendasarkan pada prosedur tetap ( PROTAP ) pelayanan;
4. Menginformasikan prosedur pelayanan melalui papan informasi;
5. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
7. Pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Menumbuhkembangkan swadaya masyarakat melalui bantuan dana stimulan;
9. Inventarisasi sumber- sumber pendapatan daerah.

#### **3.2 Kebijakan Organisasi**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kecamatan Gumelar diperlukan adanya kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kebijakan yang diambil oleh SKPD Kecamatan Gumelar adalah :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas yang semakin bertambah;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan mengacu pada protap menuju pelayanan yang baik, efektif, dan efisien, cepat dan akurat;
3. Meningkatkan akuntabilitas publik dan pengembangan transparansi penyelenggaraan pemerintah;
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan;

5. Melaksanakan kegiatan yang mendorong peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan musrenbang;
6. Meningkatkan sumber pendapatan daerah untuk menunjang perekonomian masyarakat.

**3.3 Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>
Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
		5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1. Persentase layanan kecamatan di selesaikan tepat waktu	1. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	2. Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif	2. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa
Meningkatnya peran kecamatan dan Gumelar	1. Persentase permohonan administrasi kependudukan dan Paten yang terlayani secara baik	1. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	2. Persentase Linmas terbina	
	3. Persentase desa/kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan	
	4. Persentase pembayaran PBB di Kecamatan	
	5. Persentase kelompok swadaya masyarakat di kecamatan yang aktif	
	6. Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan	

## RENCANA KINERJA TAHUN 2023 KECAMATAN GUMELAR

NO	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	86
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase layanan kecamatan diselesaikan tepat waktu	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang lebih baik	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100%
4	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa.	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100%
5	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
6	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100%

Gumelar, 16 Januari 2023

Camat Gumelar

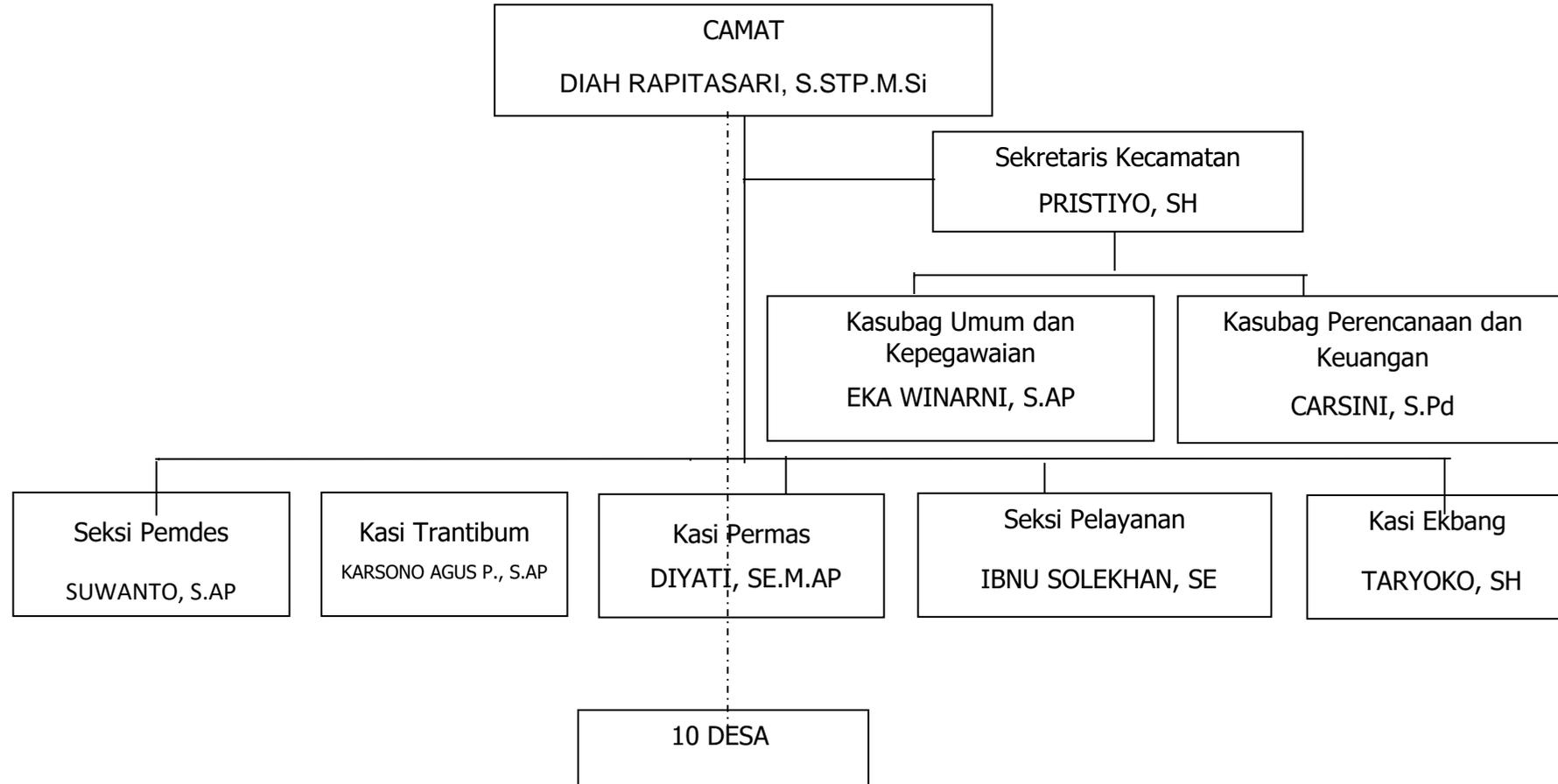


DJAH RAPITASARI, S.STP.M.Si.

Pembina

NIP. 198406062002122004

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN GUMELAR  
KABUPATEN BANYUMAS



### Pendanaan Indikatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		<b>Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b> <b>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar</b> <b>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan</b> <b>Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b> <b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b>	yang Disediakan		<b>Gumelar, Semua Kelurahan</b>	<b>100 %</b> <b>100 %</b>				<b>(PAD)</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b>  <b>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar</b> <b>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b> <b>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b>	<b>100 %</b> <b>100 %</b>		

7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<p>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	6 Paket	10 Jenis	4,502,280	PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD)	<p>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi</p>	100 % 100 % 100 % 100 %	5,000,000
-----------------	-----------------------------------	---	---	--	---	-------------------------	---------	----------	-----------	----------------------------	--	----------------------------------	-----------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
												<b>Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b>		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b>	<b>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</b>	<b>Jumlah administrasi umum yang dikelola</b>	<b>Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan</b>	<b>100 % 100 % 100 % 100 %</b>	<b>2 Paket</b>	<b>10 Jenis</b>	<b>69,562,990</b>	<b>PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</b>	<b>100 % 100 % 100 % 100 %</b>	<b>70,000,000</b>

7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<p>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	12 Paket	10 Jenis	26,762,200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	<p>Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar</p> <p>Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar</p>	100 % 100 % 100 %	27,000,000
-----------------	---	---	---	--	---	-------------------------	----------	----------	------------	-------------------------------	--	-------------------------	------------

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
												Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar			

7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	225 Laporan	10 Jenis	49,236,780	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	100 % 100 % 100 % 100 %	65,000,000
7 01 01 2.08 Peny	ediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								227,768,000				82,000,000
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	12 bulan	60,600,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar	100 % 100 % 100 % 100 %	65,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar										Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar		
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	12 Laporan	12 bulan	167,168,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Gumelar Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	100 % 100 % 100 % 100 %	17,000,000
7 01 01 2.09 Peme	lihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50,595,000					53,500,000

7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prosentase Barang Milik Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	9 Unit	9 unit	31,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan	100 %	33,000,000
-----------------	---	--	--	---	---	-------	--------	--------	------------	-------------------------------	--	--	-------	------------

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
												Gumelar		
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase Barang Milik Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	9 unit	7,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	100 %	8,500,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase Barang Milik Daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	9 unit	11,895,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Gumelar	100 %	12,000,000
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								5,490,000					12,300,000
7 01 02 2.04 Pelak	sanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5,490,000					7,000,000
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Usuran Pemerintahan	Pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	36 Laporan	12 Laporan	3,475,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Gumelar	100 %	4,000,000
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pemohon pelayanan di kecamatan yang terlayani	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	9 Laporan	12 Laporan	2,015,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Gumelar	100 %	3,000,000
7 01 03	RAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								52,271,250					54,500,000
PRO														
7 01 03 2.01 Koor	dinas Kegiatan Pemberdayaan Desa								52,271,250					54,500,000

7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gumelar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	7 Lembaga	12 Laporan	17,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gumelar	100 %	17,500,000
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Peserta Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	12 Laporan	6,210,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gumelar	100 %	7,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	28,861,250	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gumelar	100 %	30,000,000
7 01 04	PR	RAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							25,100,000					27,000,000
7 01 04 2.01	Koor	dinas Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							25,100,000					27,000,000
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	12 Laporan	20,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Gumelar	100 %	21,000,000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Gumelar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	15 Laporan	12 Laporan	5,100,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Kecamatan Gumelar	100 %	6,000,000
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							35,180,000					39,500,000
7 01 06 2.01	Fasili	tasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							35,180,000					39,500,000

7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdesa dan Perkades yang terfasilitasi	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	30 Dokumen	30 Dokumen	10,950,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	100 %	12,000,000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Perdesa dan Perkades yang terfasilitasi	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	30 Dokumen	4,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	100 %	5,000,000
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Perdesa dan Perkades yang terfasilitasi	Kab. Banyumas, Gumelar, Sirau	100 %	6 Dokumen	30 Dokumen	15,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	100 %	16,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Perdesa dan Perkades yang terfasilitasi	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	30 Dokumen	2,080,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	100 %	3,500,000	

7 01 06 2.01 10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Perdesa dan Perkades yang terfasilitasi	Kab. Banyumas, Gumelar, Semua Kelurahan	100 %	15 Dokumen	30 Dokumen	2,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Gumelar	100 %	3,000,000
TOTAL									2,276,932,000			2,270,800,000	